

# PENCAPAIAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN OLEH KEPALA SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN

**Nasyirwan**

UPTD Curup Kabupaten Rejang Lebong  
e-mail: nasyirwan24@gmail.com

**Abstract:** The objective of research is to describe the achievement of 8 national standard of education between private and public school. The method is qualitative descriptive. Collecting data use observation, documentation and interview. The result of this research: *first*, the content standard is not different; *second*, process standard are not different and qualified; *third*, graduates competency standard is different in specific traits; *fourth*, education and educator standard are different to authority of principal; *fifth*, facilities and infrastructure standard are different in procedural; *sixth*, management standard done by private schools are more elastic; *seventh*, finance standard has difference in sources; *eighth*, evaluation standard differentially in follow-up evaluation results.

**Keywords:** management, education national standard, graduates quality

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang pencapaian 8 standar nasional pendidikan antara sekolah dasar negeri dengan sekolah dasar swasta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengeumpulan data dimulai dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Diperoleh hasil penelitian: *pertama*, standar isi tidak terdapat perbedaan; *kedua*, standar proses tidak terdapat perbedaan dan memenuhi standar; *ketiga*, standar kompetensi lulusan terdapat perbedaan ciri khusus terhadap lulusannya; *keempat*, standar pendidik dan tenaga kependidikan ada perbedaan dalam kewenangan kepala sekolah; *kelima*, standar sarana dan prasarana terdapat perbedaan dalam prosedur memperolehnya; *keenam*, standar pengelolaan di sekolah swasta lebih leluasa; *ketujuh*, standar pembiayaan ada perbedaan pada sumber; *kedelapan*, standar penilaian terdapat perbedaan pada tindak lanjut.

**Kata kunci:** manajemen, standar nasional pendidikan, mutu lulusan

## PENDAHULUAN

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kondisi saling lempar tanggung jawab ini yang terpantau oleh pemerintah pusat, sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang sering dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini haruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yakni: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan.

Perbedaan manajemen dalam pengelolaan sekolah akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda juga. Kajian mutu lulusan bukan hanya dilihat dari nilai UN, melainkan karakter yang dimiliki oleh lulusan suatu sekolah mulai dari

kematangan sikap kepribadian dan sosial, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki menjadi bahan *life skill* bagi siswa untuk mampu memperjuangkan kelangsungan hidupnya pada masa yang akan dihadapinya nanti, realita ini yang menjadi tolak ukur sesungguhnya. Sekolah swasta dan sekolah negeri pada prinsipnya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tetap saja perbedaan mutu lulusan menjadi ukuran keberhasilan suatu manajemen sekolah yang dipandang oleh masyarakat pada umumnya. Sekolah swasta dengan leluasa untuk menyeleksi siswa yang benar-benar berkompeten untuk memperoleh mentalitas yang siap untuk berkompetisi baik dalam lingkungan sekolahnya maupun di luar sekolahnya, karena mereka pada umumnya sudah dibiasakan berkompetisi secara jujur dan mengutamakan kualitas. Kondisi ini akan memberikan dampak yang jauh lebih baik, ketimbang dampak lulus 100% dengan nilai tertinggi tapi berkompetisi secara curang dan tidak jujur.

Peliknya kondisi yang dialami manajer sekolah negeri berbeda dengan rumitnya manajer sekolah swasta. Kalau sekolah negeri berupaya bagaimana caranya untuk dapat memoles sekolah nampak rapi, bersih, bermutu dan menyenangkan secara fisik untuk mengambil perhatian pemerintah daerah yang memuji penyelenggaraan pendidikannya bagus dan patut dicontoh. Sedangkan sekolah swasta bagaimana caranya untuk menciptakan mutu sekolah fisik dan non fisik untuk memperoleh perhatian, simpati dan empati dari masyarakat, sehingga citra sekolah menjadi tujuan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Kondisi ini telah terjadi dari era reformasi khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang desentralisasi (otonomi) daerah.

Otoritas penuh yang diberlakukan pada pemerintah daerah terhadap aspek-aspek daerah membuat pengelolaan sekolah juga menjadi urusan yang diatur oleh pemerintah daerah dan banyak dijadikan ikon daerah untuk mendukung prestise politik sang kepala daerah. Tidak sedikit sekolah yang menjadi sasaran ujicoba, sasaran pembinaan dan sasaran penilaian-penilaian tertentu yang dibutuhkan daerah dalam mendingkrak rating politiknya, seperti untuk mencapai penghargaan adipura, sekolah sehat, sekolah berprestasi serta sekolah unggulan, namun semua diserahkan pemerintah pengelolaannya kepada manajer sekolah termasuk masalah

pengelolaan sumber keuangannya tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

Mirisnya kondisi yang dihadapi oleh sekolah negeri dan rumitnya penataan sekolah swasta merupakan hal yang menjadi pantauan penulis selaku kepala UPT Disdik Kecamatan Curup untuk dapat diperoleh keterangan dan deskripsi yang sesungguhnya sesuai dengan data, fakta dan realita yang terjadi dan dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut. Untuk itu permasalahan ini perlu penulis angkat dalam sebuah penelitian dengan topik pembahasan tentang pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan (studi perbandingan antara SD Negeri dan SD Swasta di kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong) yang berada dalam wilayah kecamatan Curup.

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah NKRI, yang meliputi 8 (delapan) muatan standar, yaitu: 1) Standar Isi (SI), mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2) Standar Proses (SP), pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 5) Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6) Standar Pengelolaan (SPI), dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajeri

memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. 7) Standar Pembiayaan (SPb), yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal biaya operasional satuan pendidikan. 8) Standar Penilaian Pendidikan (SPP), yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di SD dilakukan melalui penilaian tertulis, lisan dan praktek.

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta di UPT Disdik Kecamatan Curup? Secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar isi antara SD Negeri dan SD Swasta?; (2) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar proses antara SD Negeri dan SD Swasta?; (3) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar kompetensi lulusan antara SD Negeri dan SD Swasta?; (4) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar pendidik dan tenaga pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta?; (5) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar sarana dan prasarana antara SD Negeri dan SD Swasta?; (6) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar pengelolaan antara SD Negeri dan SD Swasta?; (7) bagaimanakah perbandingan pencapaian standar pembiayaan antara SD Negeri dan SD Swasta?; and (8) Bagaimanakah perbandingan pencapaian standar penilaian pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta di UPT Disdik Kecamatan Curup. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan berikut ini: (1) pencapaian standar isi antara SD Negeri dan SD Swasta; (2) Pencapaian standar proses antara SD Negeri dan SD Swasta; (3) Pencapaian standar kompetensi lulusan antara SD Negeri dan SD Swasta; (4) Pencapaian standar pendidik dan tenaga pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta; (5)

Pencapaian standar sarana dan prasarana antara SD Negeri dan SD Swasta; (6) Pencapaian standar pengelolaan antara SD Negeri dan SD Swasta; (7) Pencapaian standar pembiayaan antara SD Negeri dan SD Swasta; dan (8) Pencapaian standar penilaian pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah manajemen berbasis sekolah, perencanaan pendidikan, inovasi dan paradigm pendidikan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif kepada: (1)

bagi guru adalah sebagai bahan masukan tentang perbandingan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta; (2) bagi Kepala Sekolah adalah sebagai bahan masukan untuk pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta; (3) Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan masukan tentang perbandingan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SD Negeri dan SD Swasta.

## METODE

Penelitian ini memfokuskan pada upaya menganalisis fenomena yang berhubungan dengan pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan antara SDN Negeri dan Swasta di UPT Disdik Kecamatan Curup. Rentetan kegiatan penelitian yang penulis lakukan adalah melalui kegiatan awal yakni dengan cara mengobservasi objek penelitian, mencari dokumen-dokumen dan dilanjutkan dengan melakukan kegiatan wawancara pada sumber yang dapat memberikan keterangan tentang data-data yang penulis perlukan dalam penelitian dan pembahasan nantinya.

Subyek penelitian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, kepala desa dan tokoh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Subyek penelitian tersebut penulis ambil melalui teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian sehingga dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan terarah sesuai dengan sasaran penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan situasi uraian data." Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan secara sistematis transkrip wawan

rekaman foto, dokumen, dan material lainnya untuk kemudian diinterpretasikan dan diberikan makna guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fokus penelitian yang kemudian disajikan sebagai hasil penelitian.

Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik induksi analitik, namun bukan untuk menguji teori tertentu melainkan mengembangkan teori. Karena induksi analitik ini bertolak dari problem atau pertanyaan dan isu spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak data dikumpulkan dari lapangan selama penelitian berlangsung sehingga proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan menyatu. Pekerjaan mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menuliskan, mengedit, mengkalsifikasi, mereduksi, dan menyajikannya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pencapaian Standar Isi

Dalam pelaksanaan kurikulum di SDN 15 Curup Kota secara umum kurikulum sekolah disusun dan dikembangkan oleh sekolah berdasarkan petunjuk dan acuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal senada juga di SDITA bahwa sesuai dengan pengembangan mutu sekolah dan berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah, maka SDITA menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan meskipun harus mengacu pada standar nasional yang ditetapkan BSNP. Artinya pelaksanaan kurikulum yang dilakukan oleh SD Negeri dan SD Swasta yang menjadi objek penelitian menyatakan bahwa mereka sama-sama menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

SDITA terhadap penyelenggaraan dan penerapan kurikulum dilakukan dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum yang sudah disusun dan disahkan oleh yayasan dan dinas pendidikan. Secara panduan, prinsip dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terdapat perbedaan yang banyak antara SD swasta dan SD negeri di lingkungan wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup, akan tetapi berbicara muatan kurikulum yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri memiliki perbedaan. Sebagaimana

dijelaskan di atas bahwa sekolah swasta ada tuntutan khusus yang dipersyaratkan oleh pihak yayasan, sehingga mereka mempunyai ciri pembeda dengan sekolah lain baik sama-sama swasta maupun dengan sekolah negeri.

Penyusunan silabus mata pelajaran pada SDITA dalam setiap mata pelajaran disusun berdasarkan ketentuan BSNP, sehingga standar yang diinginkan oleh pemerintah pusat dapat tercapai dan pengembangan yang diinginkan yayasan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yayasan. Penyusunan silabus pada SDN 15 Curup Kota dilakukan berdasarkan ketentuan dari BSNP meskipun banyak juga yang diadopsi dari silabus yang telah tersebar pada situs-situs internet, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan beberapa silabus yang disusun oleh sekolah-sekolah lain sebagai perbandingan dan untuk penyempurnaan.

Artinya dalam konteks penyusunan silabus secara umum sudah dilakukan berdasarkan ketentuan BSNP karena sudah melibatkan pihak-pihak yang memang seharusnya terlibat. Akan tetapi pada sekolah negeri seperti yang dijelaskan di atas masih banyak pertimbangan dan perbandingan yang mereka adopsi dari silabus-silabus sekolah-sekolah ternama yang diambil dari internet. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk melakukan penyempurnaan dan menginginkan bentuk dan susunan silabus yang lebih sempurna. Sedangkan pada sekolah swasta, mereka lebih menginginkan ada muatan khusus dalam silabus mereka untuk menjadi produk unggulan dan menjadi suatu ciri khas bagi mereka untuk memberikan kepuasan pada peserta didik dan masyarakat dalam rangka kompetisi untuk menarik minat masyarakat secara luas dalam menyekolahkan anaknya ke SDITA Curup.

Penetapan KKM yang dilakukan oleh pihak sekolah baik swasta maupun negeri adalah melalui pembentukan tim kerja yang bertugas menyusun dan menetapkan rumusan KKM secara bersama-sama antar guru, kepala sekolah dan perwakilan wali murid atau komite sekolah. KKM yang dimiliki sekolah harus dikirim pada dinas pendidikan kabupaten sebagai kontrak kerja guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk dapat diukur keberhasilan guru dan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam pendidikan.

#### 2. Pencapaian Standar Proses

Secara umum guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun pada setiap mata pelajaran. RPP disusun untuk setiap pertemuan pembelajaran, walaupun untuk pertemuan berikutnya terkadang sudah disusun juga pada saat ada waktu yang lebih banyak dan memungkinkan. RPP disusun berdasarkan rencana tatap muka, setiap pertemuan dipisah dan memiliki lembaran tersendiri karena disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah. RPP yang disusun menurut keterangan yang diperoleh harus berdasarkan pada sistematika dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh BSNP. RPP yang disusun digunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dan dilakukan sesuai dengan BSNP baik muatan yang dimasukkan maupun sistematika yang dianjurkan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan upaya untuk mengawasi guru dalam penyusunan RPP. Akan tetapi terdapat perbedaan yang berkenaan dengan muatan RPP yang disusun oleh sekolah swasta terhadap sekolah negeri yang dalam skenarionya ditekankan untuk realitas dan benar-benar yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Keadaan ini dimaksudkan oleh sekolah swasta dalam mengevaluasi kinerja guru yang dapat dipertahankan atau akan mendapatkan pertimbangan khusus dalam penetapannya sebagai tenaga pendidik pada waktu selanjutnya.

Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang menyusun RPP disesuaikan dengan skenario yang telah dirancangnya dan dicanumkan sesuai dengan urutan pembelajaran yang sesungguhnya. RPP yang disusun oleh guru dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran memberikan kemudahan bagi guru yang bersangkutan untuk mengingat dan menerapkan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Bagi kepala sekolah SDITA dapat secara langsung melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya-upaya tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan intensif, pemberian reward, pemberian teguran atau pemberhentian bila dianggap benar-benar mengecewakan pihak sekolah dan yayasan. Lain halnya dengan SDN 15 Curup Kota yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindak lanjut secara maksimal kepada guru yang berstatus PNS karena proses dan prosedurnya

sangat panjang dan kewenangan kepala sekolahpun tidak sampai pada tindakan.

### 3. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Siswa di SDITA melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi akan memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Lain halnya dengan siswa di SDN 15 Curup Kota memiliki ketergantungan dengan kemampuan guru dalam mengajar, bila guru mampu menerapkan kompetensinya secara baik tentu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, namun terkadang guru tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan kompetensi secara maksimal.

Sedangkan pada siswa kelas 1 dan kelas 2, proses pembelajarannya banyak bermain dan menggunakan media-media yang menarik, baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Hal demikian ditujukan agar siswa kelas rendah dapat mengalami dan merasakan yang sebenarnya tentang beberapa kondisi konkrit yang harus mereka tahu dan kuasai. Seperti halnya dengan mengenal huruf, mengenal angka, menyusun huruf dan angka serta menulis. Selanjutnya pada kelas rendah bahwa membaca dan menulis merupakan syarat mutlak untuk naik kelas, karena bila belum mampu menulis, membaca dan berhitung akan sangat berdampak pada jenjang kelas selanjutnya.

Keterangan di atas terdapat persamaan yang signifikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam menyikapi kemampuan intelektual siswa. Akan tetapi pada sekolah swasta yang kemampuan financial sekolahnya sudah baik tentu memiliki kemampuan yang lebih dibanding sekolah negeri yang hanya bergantung pada dana pemerintah. Artinya terdapat perbedaan yang terjadi pada sekolah negeri dan sekolah swasta dalam bentuk kelengkapan alat peraga dan media pembelajaran, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, dan juga berkenaan dengan keleluasaan wewenang yang diperankan oleh kepala sekolah dalam bertindak terhadap personal yang dipimpinnya.

Selanjutnya bagi siswa yang mampu memahami dan menerapkan kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa maka ia akan rajin belajar, serta tidak akan berbuat buruk bagi sekolah dan dirinya, dan akan memiliki berbagai prestasi dalam



minat dan bakatnya. Sehingga siswa yang berprestasi akan memberikan kekhususan baginya untuk dapat naik kelas walaupun nilainya dianggap memiliki kekurangan. Namun sekolah akan memperhitungkan siswa tersebut sebagai siswa yang mampu memberikan yang terbaik untuk sekolah pada bidang lomba tertentu.

SDITA Curup merupakan sekolah yang berlandaskan pada ajaran Islam yang memberikan banyak tentang aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan di SDN 15 Curup Kota siswanya diberikan pengarahan secara terintegrasi untuk mengenal nilai sosial budaya didalam proses pembelajaran. Pada penerapannya siswa di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tetap diberikan beberapa kemampuan dasar tentang nilai-nilai sosial, meskipun di sekolah negeri bersifat nilai sosial budaya secara umum sedangkan di sekolah swasta yang di anut oleh SDITA diarahkan pada nilai sosial budaya Islam.

Kebersihan dan kesehatan juga dibiasakan oleh sekolah kepada siswa agar mereka peduli pada hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang sebagai wujud kesadaran untuk hidup disiplin dan lebih baik. Hal ini tidak diberikan secara pilih kasih dan berlaku secara tertentu saja, melainkan secara keseluruhan, berkeadilan dan memiliki kesamaan dalam menjaga kebersihan, keteriban, serta keindahan sekolah. Hal ini tergambar dari hasil observasi kelas yang peneliti lakukan di SDITA dan SDN 15 yang dalam proses pembelajarannya dilakukan melalui variasi metode mulai dari ceramah hingga diskusi dan pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan siswa terbiasa hidup bekerja sama baik dalam kelompok maupun dalam lingkungan secara umum dapat ditanamkan melalui kebiasaan proses pembelajaran yang kontekstual dan kooperatif.

#### 4. Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang mengajar di sekolah ini sudah memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen yakni secara umum sudah memiliki Akta Mengajar IV dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) oleh karena itu guru secara umum sudah berpendidikan S1, tetapi ada beberapa yang khusus masih memiliki kualifikasi pendidikan D-3, karena jurusan kekhususan ini masih jarang yang ada

di Curup, misalnya pendidikan kesehatan wanita diambil dari tamatan akademi kebidanan.”

Sementara bidang studi PAI dan Penjaskes diajar oleh guru bidang studi yang relevan sudah memiliki guru yang relevan yakni guru yang tamatan PGA melanjutkan pendidikan ke strata 1 (S-1) Pendidikan Agama Islam di STAIN Curup, atau yang penjaskes juga ada guru yang dari SGO melanjutkan pendidikan kejenjang S-1 Penjaskes Universitas Bengkulu. Hal yang sama juga di SDITA semua guru sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi keilmuannya. Sehingga dalam penerapan kompetensi pedagogiknya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, demikian juga dengan kompetensi keperibadian dan profesionalnya.

Jabatan kepala sekolah yang diemban oleh kepala sekolah SDITA dan SDN 15 Curup sama-sama berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah secara jelas dan sah. Sebagai tenaga pendidik yang telah menerima sertifikat pendidik profesional tentu sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 dengan memiliki Akta Mengajar IV, serta telah memiliki pengalaman mengajar setidaknya 5 tahun. Hal tersebut tentu akan memberikan pengalaman untuk seorang kepala sekolah dalam kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.

Tenaga administrasi memiliki kemampuan mengoperasikan komputer secara baik, staf tata usaha ini memiliki kemampuan yang bagus dalam mengoperasikan komputer dengan berbagai aplikasi dan *officena*. Penjaga sekolah yang diinginkan oleh sekolah adalah penjaga sekolah yang memiliki kemampuan dalam tata kelola keruangan sekolah, seperti kebersihan lingkungan, penataan ruang, penataan taman, penataan fasilitas lainnya sehingga berfungsi sepenuhnya, walaupun kewenangannya berbeda tapi keinginan memiliki tenaga yang berkompetensi pada bidangnya sudah menjadi target dalam prekrutan tenaga oleh suatu instansi atau lembaga. Sehingga benar-benar dapat memiliki penjaga sekolah yang bisa dan rajin bekerja dan memiliki pemahaman tentang tata cara pelaksanaan tugasnya sebagai *cleaning service*.

#### 5. Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Berkenaan dengan lahan sekolah di SDITA dan SDN 15 Curup Kota sama-sama sudah memiliki lahan yang

menampung jumlah siswa baik saat baris berbaris, senam, maupun upacara bendera. Artinya sekolah memiliki lahan yang memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa. Keadaan di sekitar sekolah berdasarkan hasil observasi peneliti tidak terdapat adanya gejala pencemaran yang berbahaya, artinya lahan sekolah berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan. Dan yang paling penting terlihat kedua sekolah yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan adanya upaya kerindangan, seperti banyak tanaman hijau, pagar, dan pohon pelindung yang sudah besar.

Fasilitas dalam pengelolaan proses pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah swasta dan sekolah negeri diperoleh gambaran bahwa sekolah memiliki fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai seperti media, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dan alat-alat olah raga. Sedangkan di SDN 15 Curup kota sebagai sekolah negeri yang dimodali sepenuhnya oleh pemerintah tidak memiliki kelengkapan media dan sarana pembelajaran seperti alat peraga atau media pengajaran.

Mebeler yang dimiliki kedua sekolah ini berdasarkan studi dokumentasi dan observasi oleh peneliti ke kelas-kelas dan keruangan-ruangan yang memiliki mebeler menunjukkan bahwa mereka memiliki dan sudah memenuhi kebutuhan terhadap mebeler, akan tetapi tentunya mebeler tersebut akan rentan sekali untuk rusak atau hancur yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Selain mebeler, di SDN 15 Curup Kota dan SDITA juga memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt. Bahkan di SDITA terdapat dua jalur instalasi listrik.

## 6. Pencapaian Standar Pengelolaan

Sekolah merupakan suatu lembaga yang wajib memiliki visi-misi dan tujuan sekolah. Hal demikian merupakan tuntutan yang mempermudah orang lain mengenal daerah kita. Umpamanya nenek tua dan tak mampu lagi bekerja maupun makan dan minum sendiri, apakah sekolah memiliki visi yang dijadikan sebagai acuan utama dalam pengelolaan sekolah. Artinya sekolah harus jelas persoalan yang dihadapi, semua sudah memiliki kesadaran untuk memahami visi-misi yang dilakukan.

SDN 15 memiliki visi menjadi sekolah yang bermutu, disiplin, dapat dipercaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan SDITA memiliki visi bahwa menuju

sekolah yang unggul, berkualitas, berprestasi serta berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Misi yang diemban SDN 15 adalah melaksanakan kurikulum dengan baik, meningkatkan kompetensi tenaga dan sarana prasarana, menanamkan nilai-nilai karakter sosial siswa, meningkatkan pengembangan kemampuan diri, mewujudkan sekolah yang bersih, nyaman dan indah.

Penyusunan visi-misi oleh kepala sekolah dilakukan secara bersama oleh beberapa perwakilan guru dan komite sekolah. Artinya visi misi yang dirumuskan oleh kedua sekolah ini sama-sama melibatkan unsur guru dan komite dengan maksud agar dapat secara bersama-sama melaksanakannya dan relevan dengan kondisi sekolah yang diakui oleh guru dan komite sekolah masing-masing. Adapun visi-misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemajuan sekolah dan memberikan arah bagi kebijakan sekolah oleh kepala sekolah.

Kegiatan merumuskan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai sekolah menurut Mardiono dilakukan dengan cara bersama-sama dan waktunya juga bersamaan dengan penyusunan visi-misi, adapun tujuan SDITA adalah berupaya untuk memberikan kualitas pada insan dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, menjadikan siswa yang handal iptek dan imtaq melalui proses pembelajaran yang bermutu, melaksanakan proses pendidikan islami dengan memberikan contoh melalui perilaku guru, karyawan dan kepala sekolah, menerapkan kedisiplinan kepada guru dan siswa melalui penertiban dan peraturan sekolah yang tegas, menerapkan pendidikan berbasis teknologi semua media yang dibutuhkan dalam pengembangan media berbasis teknologi.

Sementara itu di SDN 15 memiliki tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, yang didukung oleh kinerja pendidik secara profesional, menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi kat dan berprestasi di masyarakat dan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, terwujudnya hubungan baik antara warga sekolah dengan masyarakat, terwujudnya suasana yang kondusif antar guru, murid dan kepala sekolah, terlaksananya peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh baik di tingkat sekolah maupun tingkat daerah dan nasional.

SDITA telah menyusun dan mensosialisasikan program jangka pendek, menengah dan panjang. Juga di SDN 15 memiliki rencana strategis yang tersusun atas program jangka pendek, jangka menengah,

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan sekolah dalam melaksanakan visi-misi dan tujuan secara berkelanjutan, walaupun pada akhirnya akan diganti kepala sekolahnya.

### 7. Pencapaian Standar Pembiayaan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penganggaran di SDITA, maka sekolah memiliki rencana kerja dan anggaran sekolah, ungkap Sriyanti selaku bendahara sekolah, sama halnya dengan yang disampaikan oleh bendahara SDN 15 bahwa sekolah setiap awal tahun anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) hal ini berkenaan dengan kegiatan dan anggaran yang terutama dari dana BOS. RKAS yang didokumentasikan oleh sekolah memuat semua anggaran yang bersumber dari seluruh sumber keuangan sekolah, seperti dari BOS, komite sekolah, investasi lain yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.

SDITA ada donatur tetap dan donatur tidak tetap yang ikut berpartisipasi menanamkan investasi untuk pengembangan sekolah, hal ini sesuai dengan dokumentasi yang diarsipkan oleh bendahara dan perangkat staf sekolah. Keyakinan donatur dalam memberikan investasinya ke sekolah ini karena mereka melihat kebersamaan sekolah dalam mengembangkan dan membangun sekolah secara terbuka dan saling mengisi. Semua unsur dilibatkan secara bersama-sama dalam melaksanakan program kerja sekolah, termasuk diantaranya dalam hal penyusunan anggaran (RKAS) dan pelaporan penggunaan anggaran, sehingga arah dan tujuan pendanaan sekolah sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang dituangkan dalam RKAS dijabarkan dalam beberapa item kegiatan, termasuk di dalamnya item kegiatan kesiswaan, yang tujuannya adalah untuk memberikan anggaran yang leluasa bagi kegiatan kesiswaan menyelenggarakan semua kegiatan yang dapat dibiayai dan dikerjakan secara nyata oleh penyelenggara kegiatan. Sekolah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan secara lebih besar dan lebih banyak itemnya untuk mencapai kualitas kegiatan secara bersama-sama dan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan oleh sekolah dalam mengemas kegiatan yang berkualitas.

### 8. Pencapaian Standar Penilaian

Sekolah melakukan segala bentuk persiapan dalam pelaksanaan penilaian, diantaranya membuat kepanitiaan kerja, menyiapkan kisi-kisi soal, menyiapkan soal dan melaksanakan tes, dilanjutkan dengan kegiatan koreksi dan analisis. Rancangan kisi-kisi dan soal didokumentasikan secara jelas dan rapi oleh tim kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran, baik harian, mingguan, bulanan maupun semester.

Hasil pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan analisis dan tindak lanjut sesuai dengan hasil yang diperoleh, bisa berupa pengayaan bagi siswa yang sudah dianggap mampu, dan bisa perbaikan atau remedial bagi siswa yang dianggap masih kurang dalam mencapai hasil belajar dengan ketetapan KKM.

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru, dimulai dari penilaian kelas pada saat pembelajaran berlangsung sampai dengan penilaian akhir semester dan penilaian kenaikan kelas. Artinya pada kenyataan yang dijelaskan, bahwa antara sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat persamaan yang diatur dan dipandu dalam BSNP tentang standar penilaian hasil pembelajaran di sekolah. Persamaan ini dimulai dari penetapan tugas guru yang termasuk dalam tim perumus, penyusun dan pelaksana ujian, hingga pelaksanaan dan peninjauan secara keseluruhan melalui analisis hasil kerja yang dilakukan, sesuai dengan konsep dan sistematika BSNP.

Berkenaan dengan hasil yang diperoleh siswa dan telah dilakukan analisis, perbaikan dan pengayaan, maka guru harus melakukan pelaporan secara tertulis tentang hasil belajar siswa kepada kepala sekolah dan pengawas serta orang tua siswa secara berkala, yang setidaknya-tidaknya menurut Mardiono satu semester satu kali. Penjelasan ini juga dikemukakan oleh Margono tentang pelaporan hasil belajar siswa enam bulan sekali, melalui penyerahan buku rapor kepada wali murid sebagai laporan hasil belajar siswa dalam satu semester.

Selanjutnya dijelaskan bahwa “guru memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pencapaian tujuan sekolah.” Ungkap Margono dan didukung oleh Mardiono yang memiliki kesamaan tentang pemanfaatan hasil belajar siswa sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran disemester y:



akan menjadi acuan dasar dalam memperbaiki pengelolaannya.

## **Pembahasan**

### **1. Standar Isi**

Keterangan yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa pencapaian standar isi dalam hal ini kurikulum, silabus, dan penetapan kriteria ketuntasan minimal yang telah diterapkan oleh manajemen di SDITA Curup dan manajemen di SDN 15 Curup Kota memberikan gambaran bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada teknik dan sistematika yang diadopsi dari BSNP, akan tetapi bagi SDITA Curup ada beberapa item yang tidak dimiliki oleh SDN 15 Curup Kota sebagai sekolah negeri, berupa adanya penekanan pada nilai-nilai keagamaan (agama Islam) dikarenakan SDITA Curup menginginkan sekolah mereka memiliki ciri khas tersendiri dan menambah nilai jual di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya terdapat juga tambahan tim pengembang kurikulum bagi sekolah swasta, yakni diambil dari unsur yayasan sebagai perumus dan penjamin mutu bagi yayasan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Berkenaan dengan penetapan KKM tidak ada pembedanya, karena untuk penetapan KKM dilakukan mengikuti BSNP yang telah memberikan acuan khusus bagi guru dan sekolah. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menjelaskan bahwa “BSNP merupakan badan yang berupaya memberikan acuan standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk memberikan batasan minimal bagi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sesuai dengan jenjang yang dilaksanakan.”

Pencapaian standar ini yang dilaksanakan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri di wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam menyikapi standar nasional pendidikan, akan tetapi pada sekolah swasta ada kepentingan yayasan dalam penyusunan kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan oleh tim. Kondisi ini merupakan penambahan dan bukan penghapusan dari acuan yang diberikan BSNP dalam penyelenggaraan atau pencapaian standar isi yang dilakukan oleh sekolah swasta.

### **2. Standar Proses**

Penyelenggaraan standar proses yang dilakukan sekolah swasta dan sekolah negeri

pada wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup banyak memiliki kesamaan, yaitu dalam hal penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan proses pembelajaran dan supervisi Pembelajaran. Sebagaimana menurut Imron, (2007:73) bahwa “disekolah swasta pada umumnya memiliki manajemen yang tegas dengan kewenangan yang lebih leluasa dalam perencanaan, proses, serta supervisi pembelajaran, ini dikarenakan kewenangan sekolah swasta lebih luas dan dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan.”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara teori yang dikembangkan oleh Imron tersebut dengan kenyataan yang terjadi pada pencapaian standar proses yang terjadi pada sekolah swasta dan sekolah negeri pada wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup. Dengan demikian perbedaan yang terjadi merupakan hal yang biasa dan bukan berarti bertentangan dengan BSNP melainkan adanya penambahan berdasarkan kepentingan yang diinginkan oleh yayasan dan sekolah untuk memberikan kesan yang elegan bagi sekolahnya dalam menarik minat masyarakat yang akan memasukkan anaknya ke sekolah tingkat sekolah dasar. Menurut Suparno, 2011: 38) bahwa “beda antara sekolah swasta dan sekolah negeri dalam menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya adalah dengan cara yang elegan dan memiliki ciri khas yang menjadi unggulannya dan melalui promosi-promosi tertentu yang lebih giat dari sekolah negeri yang hanya mengandalkan popularitas dan dukungan pemerintah.”

Hal yang demikian merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak swasta mengingat pada saat ini pemerintah tidak memikirkan kelangsungan bagi sekolah swasta akibat banyaknya kepentingan dalam penyelenggaraan sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tidak memperoleh siswa bila sekolah swasta hanya berjalan seperti biasa mengikuti kondisi sekolah negeri.

### **3. Standar Kompetensi Lulusan**

Penerapan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan oleh BSNP pada sekolah-sekolah memberikan batasan minima yang harus dicapai oleh siswa dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di wilayahnya. Standar kompetensi lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat sedikit perbedaan, dikarenakan ada kepentingan sekolah swasta dalam memberikan

lulusannya berupa kemampuan membaca alqur'an, membiasakan diri untuk selalu sholat, dan memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstra kurikuler.

Suparno (2011: 92) bahwa "sekolah yang memberikan batasan minimal tertendah menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sekolahnya gak mampu untuk berkompetisi." Artinya pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan perlu memperhatikan daya jualnya supaya masyarakat memiliki keyakinan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bersangkutan. Oleh karenanya sekolah swasta yang memiliki ciri khas tersendiri yang akan dikejar sama peserta didik, dan akan dapat menarik minat belajar siswa pada sekolah yang memiliki kelebihan dan produk unggulannya.

Standar kompetensi lulusan yang dilakukan pengelolaannya oleh manajemen pendidikan di sekolah swasta dan sekolah negeri pada wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Akan tetapi sekolah swasta yang memiliki basis sekolah keagamaan atau kejuruan lebih memiliki adanya penekanan pada ciri khas sekolah tersebut sebagai bentuk pembedanya, hal ini merupakan suatu upaya sekolah swasta dalam memberikan ciri tertentu pada lulusannya sebagai produk unggulan sekolah swasta di tengah-tengah masyarakat.

#### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan pengelolaannya oleh manajemen pendidikan di sekolah swasta dan sekolah negeri dalam wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup sudah mengacu pada BSNP, di mana guru pada umumnya sudah berbasis S-1 Pendidikan, Kepala sekolah sudah memiliki kemampuan manajemen dan sudah memiliki masa kerja sebagai guru lebih dari 5 tahun, sedangkan tenaga administrasi yang direkrut juga sudah memiliki keterampilan dalam menguasai komputer dan surat menyurat.

Hal ini menurut Sutarrahman, (2007:117) bahwa "guru dan kepala sekolah merupakan pelaku profesi yang harus menerapkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik secara maksimal dengan memenuhi beberapa ketentuan, sehingga dapat menciptakan *out put* yang diharapkan oleh instansi pendidikan." Selanjutnya Imron, (2007: 132) mengungkapkan bahwa "untuk memaksimalkan potensi sekolah termanfaatkan dalam pengelolaannya, sekolah

hendaknya memiliki tenaga administrasi yang mampu dan memahami tentang tata administrasi sekolah, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tidak kehilangan data tentang inventarisasi sekolah."

Pendapat tentang pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, memberikan gambaran bahwa secara umum diharapkan sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki standar sesuai dengan BSNP dan mampu menerapkan kompetensinya secara maksimal. Oleh karena itu pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup dapat berjalan dengan baik dan teruji.

#### 5. Standar Sarana dan Prasarana

Pengelolaan yang dilakukan sekolah terhadap standar sarana dan prasarana yang dimiliki telah dapat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar pada sekolah swasta dan sekolah negeri. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen sekolah merupakan upaya yang maksimal dilakukan untuk memanfaatkan dan merawat segala sesuatu yang bersifat milik sekolah dalam konteks sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan.

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh manajemen sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan dalam prosedur memperolehnya, di mana sekolah swasta dapat meminta bantuan pada pemerintah melalui dana hibah dan juga dapat memperoleh dari pihak yayasannya, sedangkan sekolah negeri hanya bersumber dari dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan Tilaar, (2004:3.18) bahwa "faktor lain yang sangat berperan dalam penataan sekolah agar dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan secara maksimal adalah terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap." Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ali, (2008:119) bahwa "sekolah hendaknya memiliki sarana dan prasarana penunjang pendidikan secara baik dan mencukupi semua kepentingan proses pembelajaran, sehingga kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal serta dapat mencapai tujuan pendidikan di sekolah maupun tujuan secara umum tentang kualitas lulusannya." Pendapat di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya sarana dan prasarana yang dapat

mendukung penyelenggaraan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun keadminis-trasian.

## 6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pada sekolah swasta dan sekolah negeri dalam wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup telah memiliki standar nasional pendidikan dan dapat memberikan pengalaman khusus bagi peneliti dalam mengamati dan meneliti semua yang telah dilakukan oleh manajemen sekolah. Pengelolaan yang dilakukan menunjukkan telah berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun msaih ada beberapa hal yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan tidak bersifat mengintervensi penyelenggara sekolah dalam memajemen sekolah. Pengelolaan yang dilakukan di sekolah swasta lebih memiliki keleluasaan dan tidak adanya intervensi dari pihak pemerintah dalam manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BSNP, sedangkan sekolah negeri sering terjadinya dualism kepentingan dalam pengelolaan sekolah.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki keunggulan dalam memiliki sarana dan prasarana adalah hal yang tidak berlaku secara umum, sebab bagi sekolah swasta yang belum memiliki kemampuan finansial bisa saja berada di bawah sekolah negeri, namun dalam sistem pengelolaannya menurut Imron, (2007:152) bahwa sekolah swasta lebih mengutamakan kompetensi penyelenggara sekolah yang lebih berpotensi dalam rekrutment ketenagaan, sehingga sekolah swasta memiliki tenaga yang lebih handal dan berkompotensi dibandingkan di sekolah negeri, walaupun hal ini tidak berlaku pada semua sekolah swasta. Artinya keadaan ini hanya bagi sekolah-sekolah swasta yang yayasan pemiliknya sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup mapan dan memiliki tujuan untuk kemajuan yang tinggi.

## 7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan dalam pengelolaan sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup secara umum telah memiliki orientasi untuk memberikan sebaran pembiayaan sesuai dengan prioritas masing-masing dalam beberapa item pembiayaan. Pelaksanaan RKAS oleh kepala sekolah dan bendahara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dan tidak dilakukan hal-hal yang menyimpang dalam pembayaran gaji, honor kegiatan serta pembelian barang.

Standar pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri berdasarkan BSNP tidak terjadi perbedaan, hanya saja sekolah swasta memiliki sumber biaya yang lebih dari sekolah negeri yang hanya terfokus pada dana yang dibantukan oleh pemerintah melalui dana BOS. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sergiovanni, (2005:173) bahwa “keuangan sekolah akan sangat tergantung dengan keterbukaan dan ketepatan penggunaan anggaran oleh manajemen sekolah dan bendahara dalam melakukan pembelanjannya, apabila bagus pengelolaannya maka akan terkesan bagus juga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.” Pendapat ini menjelaskan betapa pentingnya pengelolaan sekolah dalam hal pembiayaan sekolah untuk dilakukan secara terbuka dan berkeadilan, yang mampu membiayai semua aspek penyeleng-garaan pendidikan secara merata dan memberikan prioritas pada kegiatan yang menyentuh kegiatan kesiswaan.

Pencapaian yang dilakukan secara umum sudah baik dan tidak terdapat penyalahgunaan anggaran, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri walaupun secara prioritas hanya bersumber dari dana BOS, sedangkan pihak sekolah swasta sedikit lebih banyak sumber keuangannya meskipun mereka juga harus membiayai penggajian tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan PNS sebagaimana di sekolah negeri.

## 8. Standar Penilaian

Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, menyusun kisi-kisi, dan menyusun soal secara rapi dan jelas. Pencapaian standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada BSNP, akan tetapi tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutarrahan, (2007: 149) bahwa “penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan prosedural, untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam menarik kesimpulan tentang hasil belajar siswa baik penjenjangan kelas, maupun dalam penentuan kelulusan.” Pendapat ters

bahwa pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah sudah sesuai dengan keinginan dari penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, karena di sekolah swasta maupun di sekolah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Simpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengelolaan sekolah swasta dan sekolah negeri di wilayah kerja UPT-Disdik Kecamatan Curup, akan tetapi ada beberapa item dari 8 standar tersebut yang berbeda dengan adanya andil dari pihak yayasan bagi sekolah swasta, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Standar isi tidak terdapat perbedaan dalam menyikapi standar nasional pendidikan, akan tetapi pada sekolah swasta ada kepentingan yayasan dalam penyusunan kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan oleh tim.
2. Standar proses yang dilaksanakan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri dalam wilayah UPT-Disdik Kecamatan Curup tidak terdapat perbedaan yang mendasar dan tetap memenuhi standar nasional pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan, dikarenakan ada kepentingan sekolah swasta dalam memberikan ciri khusus terhadap lulusannya berupa kemampuan membaca alqur'an, membiasakan diri untuk selalu sholat, dan memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstra kurikuler.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah swasta dan sekolah negeri juga terdapat perbedaan meskipun tidak mendasar, yakni terdapat perbedaan dalam kewenangan kepala sekolah atau pihak yayasan untuk mengangkat dan menghentikan tenaga pendidik dan kependidikan yang dinilai tidak memenuhi standar nasional pendidikan, sedangkan di sekolah negeri tidak memiliki kewenangan tersebut.
5. Standar sarana dan prasarana yang dikelola oleh manajemen sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan dalam prosedur memperolehnya, di mana sekolah swasta dapat meminta bantuan pada pemerintah melalui dana hibah dan juga dapat memperoleh dari pihak yayasannya, sedangkan sekolah negeri hanya bersumber dari dana pemerintah.

6. Standar pengelolaan yang dilakukan di sekolah swasta lebih memiliki keleluasaan dan tidak adanya intervensi dari pihak pemerintah dalam manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BSNP, sedangkan sekolah negeri sering terjadinya dualism kepentingan dalam pengelolaan sekolah.
7. Standar pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri berdasarkan BSNP tidak terjadi perbedaan, hanya saja sekolah swasta memiliki sumber biaya yang lebih dari sekolah negeri yang hanya terfokus pada dana yang dibantukan oleh pemerintah melalui dana BOS.
8. Standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada BSNP, meskipun tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan.

### Saran

Secara umum dapat penulis sarankan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan sekolah dasar baik di SD Negeri maupun di SD Swasta. Selanjutnya secara khusus penulis rekomendasikan kepada:

1. Kepada guru, hendaknya selalu melakukan pekerjaan dengan disiplin dan bekerja dengan kesungguhan serta menyesuaikan pelaksanaan proses pembelajaran dengan standar nasional pendidikan.
2. Kepada kepala sekolah, sekiranya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu reperensi dalam menyikapi pencapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
3. Kepada kepala dinas pendidikan, hendaknya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala sekolah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah dan menerapkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Pemerintah daerah otonom, hendaknya menyesuaikan program dan kebijakan terhadap 8 (delapan) standar nasional pendidikan sehingga dapat menciptakan kompetisi yang berkualitas pada kepala sekolah dan guru dalam menata sekolah menjadi lebih berkualitas.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M.H. 2008. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.

- Imron, Ali. 2007. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sasongko, Rambat, Nur, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Penulisan Makalah, Referensi, dan Tesis)*. Bengkulu: Prodi MAP PPs FKIP Universitas Bengkulu
- Sergiovanni. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2011. *Siapakah Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium Ketiga?*. Malang: Jurnal FKIP Universitas Malang.
- Sutarrahan. 2007. *Keunggulan Hibrida Guru dalam Implementasi Teknologi Pembelajaran*. Garut: Orasi Ilmiah dalam Acara Wisuda STKIP Garut.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.